

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita naikkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenananNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dapat diselesaikan pada tepat waktunya.

Disamping merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2025 yang ditujukan kepada Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 kepada Masyarakat secara tertulis.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dapat terlaksana berkat kerja sama yang baik dari para Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya dan pihak-pihak lain yang terkait. Penyusunan Laporan ini sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kami menyadari bahwa walaupun LKIP Dinas Perindustrian Perdagangan Tahun 2025 ini merupakan LKIP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2030, namun penyajiannya masih dijumpai banyak kendala yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hal ini disebabkan bahwa Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SKIP) yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih dalam proses pengembangan, namun kami terus berupaya untuk meningkatkan baik dalam penyajian maupun substansi penyusunan LKIP di tahun mendatang.

Selanjutnya kami berharap semoga laporan yang telah selesai disusun ini dapat bermanfaat khusus bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam upaya untuk melakukan peningkatan pencapaian kinerja yang telah ditekankan didalam RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya 2025-2030.

Tambolaka, Februari 2026

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumba Barat Daya,



Agustinus Dappa, S.Sos
Kepala Dinas Muda
NIP. 19691117 199803 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Tahunan merupakan produk dari proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi Kabupaten Sumba Barat Daya. Rencana Kinerja Tahunan memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 yang menjadi dasar bagi pelaku kebijakan.

Rencana Kinerja Tahunan 2025 mempedomani Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2030 Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dan diwujudkan. Pada RPJMD 2025-2030 memuat 8 sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahunan, serta pengukuran pencapaian sasaran tersebut melalui indikator-indikator kinerja.

Rencana Kinerja Tahunan 2025 merupakan gambaran rencana pelaksanaan kegiatan dalam tahun kelima masa kepemimpinan **Ratu Ngadu Bonnu Wulla, ST** dan **Dominikus Alphawan Rangga Kaka, SP** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab harapan masyarakat. Dalam usaha ini yang dipedomani adalah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dengan Tujuh Jembatan Emas. Komitmen ini dimotivasi lewat visi Bupati dan wakil Bupati Sumba Barat Daya : "**Membangun Desa Menata Kota**".

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur staf dan pelaksana teknis dalam mewujudkan kebijakan dan program strategis Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan, kebijakan program dan kegiatan belum seluruhnya dapat memenuhi kebutuhan dan

menjawab harapan dari masyarakat, karena pelaksanaan pembangunan didasari pada prioritas kebutuhan masyarakat dan ketersediaan serta kemampuan pembiayaan.

Dalam tahun anggaran 2025 Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang tersedia untuk melaksanakan program dan kegiatan sebesar Rp. 3.706.166.090 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 3.556.166.090 dan belanja modal sebesar Rp. 150.000.000. Realisasi anggaran yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 3.556.166.090 dan belanja modal sebesar Rp. 150.000.000 yang sumber pembiayaannya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
IKTISAR EKSEKUTIF	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Manfaat LKIP	2
C. Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3
D. Sistematika Penyajian LKIP.....	13
 BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	
A. Perencanaan Kinerja	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	15
C. Rencana Anggaran.....	16
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Proses pengukuran kinerja.....	17
B. Uraian hasil pengukuran kinerja	18
C. Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.....	19
D. Akuntabilitas keuangan.....	20
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpul Akuntabilitas Kinerja	22
B. Rencana Tindak Strategis Peningkatan Kinerja	23
 LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2026 (RKT)	
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 (PK)	
3. PENGUKURAN KINERJA	
4. RENCANA STRATEGIS	
5. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2026	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unit otonom yang berkedudukan di dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kabupaten Sumba Barat Daya, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 8 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dengan demikian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Sumba Barat Daya melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian diberi ruang untuk melaksanakan program / kegiatan strategis. Untuk melaksanakan Program / Kegiatan tersebut, maka dialokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran tersebut, wajib dipertanggungjawabkan secara transparan setelah Tahun Anggaran Berjalan, adapun sarana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dasar acuannya Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Permen PAN-RB Bab IV, disebutkan LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Pada Pasal 16 ayat 1, menyebutkan LKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen

penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran, sesuai ayat 2, sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2025, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025.

B. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Tujuan dan manfaat pembuatan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang disampaikan di sini sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB RI No. 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan pembuatan LKIP Perindustrian dan Perdagangan yaitu:

- a. Memberi pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran yang telah berjalan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), dalam upaya mencapai visi dan misi.
- c. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan baik jangka pendek maupun jangka menengah

2. Manfaat

Manfaat pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu:

- a. Mendorong instansi pemerintah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*).
- b. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- d. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. PROFIL Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya, sesuai dengan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 08 tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian dibentuk dengan Satu Sekretariat dan Tiga Bidang. Sekretariat dijabat oleh Sekretaris dengan dua Sub Bagian sedangkan bidang dijabat oleh Tiga kepala bidang dengan Sembilan pejabat fungsional.

Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya, yakni:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya, yakni Agustinus Dappa, S.Sos

2) Sekretariat

Sekretaris pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya, yakni Febronia Mete, S.Pi dan dibantu oleh 2 (dua) Kasubbag. Yakni:

- a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian, yakni Maria Bebyana Kole, A.Md
- b. Kasubbag Keuangan dan Aset, yakni Aquinata M. Ellanor, S.Tr

3) Bidang

Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya, yakni:

- a. Kabid Perindustrian, yakni Maria Suharyanti, S.Sos
- b. Kabid Perdagangan, yakni Maria Muda Holo, SH
- c. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Kerjasama dan Promosi yakni Hendrikus H. M. Mada, SE

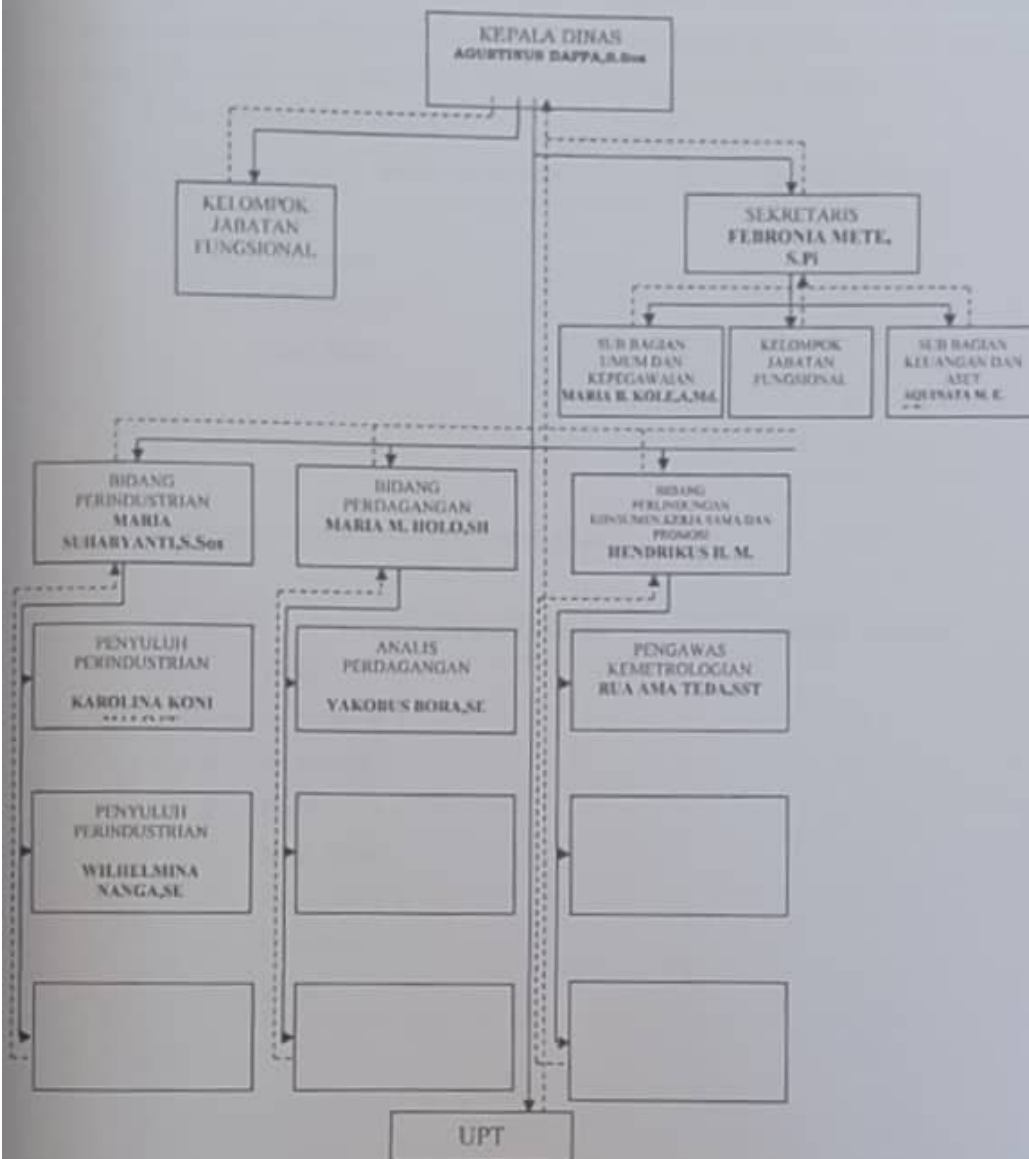
4) Kelompok Jabatan Fungsional Pada Bidang

Bidang-Bidang pada Dinas Perindustrian dan Kabupaten Sumba Barat Daya terdiri dari beberapa jabatan fungsional, yakni:

- a. Bidang Perindustrian
 - Penyuluh Perindustrian, yakni Karolina Koni Malo, SE
 - Penyuluh Perindustrian yakni Wilhelmina Nanga, SE
- b. Bidang Perdagangan
 - Analis Perdagangan, yakni Yakobus Bora, SE
- c. Bidang Perlindungan Konsumen, Kerja sama dan Promosi
 - Pengawas Kemetrolagian, yakni Rua Ama Teda, SST

Sedangkan bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya, sesuai dengan Peraturan Bupati No. 08 Tahun 2023 tersebut, sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumba Barat Daya



2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah keadaan pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kabupaten Sumba Barat Daya Sampai dengan Bulan Desember 2024, pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 24 orang terdiri dari 16 orang PNS dan 8 orang Non PNS dengan perincian sebagai berikut :

a. Menurut Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
	PNS	
1	Laki-laki	8
2	Perempuan	8
	Non PNS	
1	Laki-laki	6
2	Perempuan	2

b. Menurut latar belakang pendidikan :

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
	PNS	
1	Sarjana S 1	14
2	Diploma	2
3	SMA	-
	Non PNS	
1	Sarjana S 1	2
2	Diploma	1
3	SMA	5

c. Menurut golongan :

NO	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV/c	1
2	Golongan IV/b	1
3	Golongan IV/a	1
4	Golongan III/d	3
5	Golongan III/c	4
6	Golongan III/b	1
7	Golongan III/a	1
8	Golongan II/c	-
9	Golongan IX	4

d. Menurut Diklat Penjenjangan dan Perencanaan yang diikuti :

NO	Diklat Penjenjangan	Jumlah (Orang)
1	Pim III	2
2	Pim IV	4

e. Menurut Jabatan Struktural :

NO	Eselon	Jumlah (Orang)
1	Eselon II/b	1
2	Eselon III/a	1
3	Eselon III/b	3
4	Eselon IV/a	6
5	Staf	5

3. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana kerja juga merupakan unsur yang sangat penting dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan saat ini tergambar sebagai berikut :

a. Kepemilikan tanah

Tidak memiliki aset tanah.

b. Bangunan dan Gedung

aset bangunan dan gedung yang dikuasai oleh Perindustrian dan Perdagangan ada 3 unit yakni bangunan dan gedung sentra Industri Bambu yang berlokasi di Kecamatan Wewewa Timur, bangunan dan gedung sentra industry bambu yang berlokasi di Kecamatan Wewewa Selatan, bangunan dan gedung sentra industry tenun ikat yang berada di Kecamatan Kodi Balaghar.

c. Mesin, Peralatan dan perlengkapan kantor.

Sarana dan prasarana perkantoran yang disampaikan disini terbatas pada keadaan Kendaraan operasional dan ekonomi produktif, sebagaimana disajikan berikut ini.

Keadaan sarana dan prasarana yang ada yaitu :

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Mobil	1			
2	Sepeda Motor	1	1		
3	WIFI	1			1

4	Kursi Putar	3	1	2	
5	Kursi kerja	25	20	5	1
6	Kursi rapat	20	10	10	
7	Laptop	6	4		2
8	Printer Canon multifungtion	3	3		
9	Kipas angin	2	2		
10	Meja Kerja 1/2 biro	10	7		3
11	Meja Tulis	1	1		
12	Meja Rapat	3	1	2	
13	Lemari arsip	8	7	1	

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKIP

LKIP ini diawali dengan Kata Pengantar, Daftar Isi dan Ringkasan Eksekutif, sebagai penuntun bagi pimpinan dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran singkat tentang informasi yang disampaikan dalam Batang Tubuh LKIP.

Sedangkan Batang Tubuh LKIP dibagi dalam 4 (empat) bab yang meliputi:

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat LKIP, Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Sistematika Penyajian LKIP.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada Bab II ini menyajikan Perencanaan Kinerja yang meliputi Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Penetapan Tujuan, dan Penetapan Sasaran. Disamping itu, juga diuraikan tentang Rencana dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 serta Rencana Anggaran Tahun 2024

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III ini menyajikan proses pengukuran kinerja yang meliputi penetapan indikator kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Setelah itu dilakukan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

Bab IV. Penutup

Pada Bab IV ini menyampaikan simpulan akuntabilitas kinerja dan rencana tindak strategis untuk peningkatan kinerja.

Disamping Pengantar dan Batang Tubuh tersebut di atas, LKIP ini juga dilengkapi dengan Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Rencana Strategis (RS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025, sebagai data dan informasi pendukung.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

A. PERENCANAAN KINERJA

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya 2025 – 2030 dan memperhatikan RPJMD Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pernyataan Visi

Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya mengacu pada Visi Pembangunan Kabupaten yaitu : **"Membangun Desa Menata Kota"**

2. Pernyataan Misi

Dalam upaya untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut :

- a) Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat Daya yang maju dan berkualitas, didukung sarana dan prasarana kehidupan yang layak dan memadai;
- b) Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, bersih, efektif dan terpercaya;
- c) Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat Daya yang sejahtera.

3. Penetapan Tujuan

Untuk melaksanakan misi tersebut di atas, maka ditetapkan tujuan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, pengembangan peluang usaha industri kecil (Home Industry) dan Perdagangan serta meningkatnya penanam modal.

4. Penetapan Sasaran

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut:

- Meningkatnya penanaman modal dan perdagangan dalam daerah;
- Meningkatnya IKM serta industri kecil.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 disusun mengacu pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tersebut telah ditindak lanjuti menjadi Penetapan Kinerja (PK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.

Tujuan, Sasaran dan Program Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2025 – 2030 tabel seperti dibawah ini:

Penetapan Kinerja (PK) Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2025, sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program	Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya perdagangan dalam daerah	Cakupan revitalisasi pasar	18,75	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	180.933.328
	Cakupan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	100	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kegiatan Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kab/kota	419.371.000
	Cakupan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor	25	Program pengembangan ekspor	Kegiatan Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi	0

LKIP DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025

	unggulan kabupaten			dagang bagi produk ekspor unggulan yg terdapat pada satu daerah kab/kota	
	Cakupan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang	30	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Kegiatan Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan	155.319.500
	Cakupan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan produk lokal	20	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Kegiatan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	4.680.000
Meningkatnya IKM serta industri kecil	Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Industri	40	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.376.008.874
	Cakupan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten	1	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	19.474.000

C. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun 2025 sebesar Rp . 3.037.614.624 terdiri dari :

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Operasi	3.556.166.090
2	Belanja Modal	150.000.000
Jumlah		3.706.166.090

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PROSES PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam pengukuran kinerja ini dilakukan dengan suatu metode atau proses yang meliputi yaitu:

1. Penetapan Indikator Kinerja

Proses Capaian Kinerja di dahului dengan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi yaitu:

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan, misalnya Sumber Daya Manusia, Dana, Material, Waktu, Teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. Penetapan Kinerja

Langkah selanjutnya adalah penetapan indikator kinerja adalah menetapkan rencana tingkat capaian (*target*) kinerja yang diinginkan, sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun anggaran 2025 atau melalui penyelarasan RKT dan PK Tahun Anggaran 2024 dengan Perubahan Anggaran Tahun 2025.

No.	Sasaran	NilaiCapaianKinerja (%)
1	Meningkatnya Perdagangan dalam daerah t	65
2	Meningkatnya IKM serta industri kecil	75

A. EVALUASI DAN ANALISISAKUNTABILITASKINERJA

KinerjaDinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Sumba Barat Dayatahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 :Meningkatnya Perdagangan dalam daerah

Kinerja sasaran ini mencapai 65 %. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 6(enam) program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerjanampaksepertidalamtabelberikutini:

No.	IndikatorSasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan Bina Perdagangan/Usaha informal dan Presenase Jumlah pasar yang di fasiliasi pengelolaan sarana perdagangan	100	-	65

Dari 1 (satu) indikatorsasrantersebuttampakbahwa berhasilmencapai43,75 %Pencapaian kinerja sasaran 1 (satu) tersebut diatas,apabila dibandingkan dengan ahun 2025.

Sasaran2 :Meningkatnya Usaha Mikro

Kinerjasasaraninimencapai75 %. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 2(dua) program dan 2(dua) kegiatan dengan 2 (dua)indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerjanampaksepertidalamtabelberikutini:

...kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Industri kecil Menengah (%)	40	14	35
2	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	14	14	100

Dari 2 (dua) indikator sasaran tersebut tampak bahwa berhasil mencapai 70% - 84% pada tahun 2025. Namun apabila ditinjau dari rencana lima tahunan dalam Rencana Strategis (Renstra), sampai dengan tahun ini menunjukkan tidak adanya kenaikan yang signifikan pada sasaran tersebut dikarenakan banyaknya refocusing anggaran pada tahun 2025.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kemampuan pengelolaan Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun 2025 dapat disampaikan melalui tabel berikut ini.

Sasaran/Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				
a	Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.508.000	4.508.000	100
b	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.227.528.510	1.183.301.111	96,39
c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.625.000	55.625.000	100
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.259.200	1.259.200	100
e	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.653.000	47.100.400	98,8
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.678.000	31.125.400	98,25
g	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.635.328	72.376.578	80,74

LUP DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025

Program 2	a	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.594.750	26.442.736	
	c	Pembelian Peralatan dan Mesin Lainnya	2.200.000	2.200.000,00	100
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
Program 3	a	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	1.376.008.874	811.199.624	58,95
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
Program 4	a	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan [PK] kewenangan Kabupaten/Kota	19.474.000	19.428.200	99,7
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
Program 5	a	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	180.933.328	162.082.467	89,58
	PROGRAM STABILISASI HARGA KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
Program 6	a	Kegiatan Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kotaPerdagangan	419.371.600	419.371.600	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
Program 7	a	Kegiatan Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	0	0	0
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
Program 8	a	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa tera, Tera Ulang dan Pengawasan	155.319.500	149.212.100	96,06
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
Program 9	a	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	4.680.000	4.680.000	100,00

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa rata-rata kinerja realisasi pelaksanaan anggaran mencapai 78,33 % atau termasuk sangat baik. Pencapaian realisasi anggaran tersebut memang belum sesuai dengan yang direncanakan yakni 100 %. Hal ini terjadi karena efisiensi belanja yang dilakukan.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memuat kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam Tahun 2025.

Dalam usaha mewujudkan 2 sasaran kinerja dari 2 sasaran kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah ditetapkan pada tahun 2025 telah dilaksanakan 8 program dan 8 kegiatan dengan indikator sasaran. Berdasarkan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab III tersebut diatas, maka dapat diambil Kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata pencapaian kinerja dari 2 sasaran adalah 75 %. Mengacu pada Skala Pengukuran Ordinal, maka pencapaian kinerja tersebut dikategorikan *Berhasil* karena sesuai dengan Standar.
2. Pencapaian kinerja 2 sasaran yang dikategorikan berhasil dengan Pencapaian kinerja 75 % adalah sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya perdagangan dalam daerah
 - 2) Meningkatnya IKM serta Industri kecil

B. RENCANA TINDAK STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA

Rencana tindak strategis peningkatan kinerja sebagai upaya antisipatif dan korektif yang akan ditempuh dalam rangka perbaikan untuk mensiasati kegagalan atau kurangberhasilan pencapaian kinerja sasaran-sasaran pada tahun 2025 yaitu:

1. Meningkatkan disiplin kerja dan kapasitas kompetensi Sumber Daya Aparatur Pegawai melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan
2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kerja aparatur pegawai.
3. Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengukir prestasi dan kinerja yang lebih baik.
4. Mengidentifikasi seluruh potensi yang ada dan memaksimalkan pemanfaatannya serta menjalin koordinasi antara Instansi terkait secara terintegrasi.
5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dan bersih.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, semoga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan pelayanan kemasyarakatan ke depan.

Tambolaka, Februari 2025

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumba Barat

Daerah
Pemerintah Kabupaten
DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Agustinus Dappa, S.Sos
Pembina Muda
NIP. 19691117 1983031 006

**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

UPO Unit Kerja Mandiri : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	realisasi	%
Cakupan Bina usaha Pedagang/Usaha Informal dan Presentasi jumlah pasar yang difasilitasi pengelolaan sarana perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	100	7	43,75
Meningkatnya IKM serta industri kecil	Persentase Industri kecil Menengah (%)	40	14	35
	Cakupan bina kelompok pengrajin	14	14	100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2025 : Rp. 3.706.166.090

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 :
 ➤ Belanja Operasi : Rp. 3.556.166.090
 ➤ Belanja Modal : Rp. 150.000.000

% realisasi kegiatan tahun 2024 : 78,33 %

RENCANA STRATEGIS

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran	Strategis & Arah Kebijakan		Indikator Kinerja	Program	Ket
	Strategis	Arah Kebijakan			
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya peran pengusaha dalam daerah	Mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan investasi dalam rangka penanaman modal dan peningkatan perdagangan dalam daerah	Meningkatkan kualitas infrastruktur penunjang usaha perekonomian masyarakat	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	Program sarana distribusi perdagangan	
Meningkatnya IKM serta industri kecil	Pemberdayaan dan pembinaan IKM serta industri kecil		Cakupan bina kelompok pengrajin	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota / Keg. Penertiban IUI kecil dan IUI menengah	

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan:

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya perdagangan dalam daerah	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	100	43,75	65
Meningkatnya IKM serta industri kecil	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	14	14	100